

DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyono, A. (2017). Transfer Dana Sebagai bentuk Desentralisasi Fiskal Bagi Pemerintah Daerah. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 85-164.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). *Buku Pedoman Pelaksanaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Fakultas Ilmu Politik Dan Sosial Universitas Indonesia. (2020). *Kriminalitas Yang Terjadinya Selama Wabah Covid-19*. Jakarta: Fisip UI.
- FISIP UI.COM. (2020). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Dipetik Maret 23, 2022, dari <https://fisip.ui.ac.id/pandangan-ketua-departemen-kriminologi-fisip-ui-terkait-kriminalitas-selama-terjadinya-wabah-covid-19/>
- Kompas.com. (2020). *KOMPAS Amanat Harian Nurani Rakyat*. Dipetik Maret 23, 2022, dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2020/04/22/minimarket-pemikat-para-penjahat/>
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhanisah, Y. (2020, April 23). *Di Tengah Pandemi, Angka Kemiskinan Meninggi*. Indonesia Baik. Diambil kembali dari Indonesiabaik.id: <https://indonesiabaik.id/infografis/di-tengah-pandemi-angka-kemiskinan-meninggi>
- Peraturan Bupati Sleman. (2020). *Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.2 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Sleman.
- Peraturan Bupati Sleman. (2021). *Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok. Peraturan Bupati Sleman Nomor 37.2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok*. Sleman.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang*

Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.* Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).* Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Prov/Kab/Kota TA 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.07/2020 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Prov/Kab/Kota TA 2021.* Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi .* Jakarta.

Ramadhan, F. M. (2019). *Negara Dengan Persentase Perokok Terbanyak Indonesia Tertinggi.* Tempo.

Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Lentera Bisnis*, 109-120.

Saputra, D. (2021). *Kontribusi Industri Hasil Tembakau ke APBN Sebesar 10,11 Persen di 2020.* Bisnis Indonesi.

Sari, I. (2015). *Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Cukai Hasil Tembakau.* Jakarta: Yuridika.

Sari, I. M. (2010). *Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau Ditinjau dari Cukai Rokok.* Jakarta: Yuridika Vol 25.

- Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal.
- Soegiono. (1993). *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Penelitian Data*. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.
- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. 165-178.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Keuangan Negara. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). Cukai. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Pemerintah Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Wulandari, F. (2018). Efektivitas Pemanfaatan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang kesehatan di Kota Surakarta.
- Yang, L., & Shasha, L. (2020). COVID-19 : Immunopathogenesis And Immunotherapeutics. *Signal Transduction and Targeted Therapy*.
- Yanti, N. P., & Nugraha, I. M. (2020). Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 Dan Perilaku. *Keperawatan Jiwa*, 485-490.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3 ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhri, M., & Handayani, A. (2015). Implementasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Di Jawa Tengah.